

Judul : Fungsi Legislasi dan Perilaku Koruptif Jadi Tantangan: HUT ke-73 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat
Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

HUT KE-73 TAHUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Fungsi Legislasi dan Perilaku Koruptif Jadi Tantangan

JAKARTA - Tepat 29 Agustus kemarin, DPR merayakan ulang tahun yang ke-73. Dalam usia yang cukup matang ini, DPR fokus membenahi kelemahan dalam bidang legislasi serta maraknya kasus korupsi yang menjerat para anggotanya.

"Dalam rangkaian peringatan HUT DPR, tahun ini diadakan lomba *Stand Up Comedy* dengan mengangkat tema Kritik terhadap DPR. Yang mendapat banyak sorotan adalah rendahnya kinerja DPR dalam membuat UU serta banyaknya anggota yang terlibat kasus korupsi. Semua kritikan yang disampaikan, patut kita jadikan sebagai cambuk dan masukan untuk melakukan perbaikan ke depan," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidato Laporan Kinerja DPR tahun 2017-2018 dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan, dalam masa sidang 2017-2018, DPR telah berhasil menyelesaikan 17 UU sehingga DPR periode 2014-2019 telah menelurkan 62 UU. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa kinerja di bidang legislasi belum sesuai dengan harapan rakyat. Karena itu, pimpinan DPR terus mengajak semua fraksi, komisi, dan anggota DPR untuk bekerja keras menyelesaikan Rancangan UU (RUU) yang disepakati dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Alhamdulillah, hasilnya cukup mengembirakan. Pada masa sidang lalu, kita berhasil menetapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah dibahas selama dua tahun



Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kanan) menyaksikan karya foto yang dipamerkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

menjadi UU," ujarnya.

Bambang menjelaskan, kinerja legislasi tahun sidang 2017-2018 dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja DPR yang disampaikan pada setiap tahun sidang, yakni Agustus. Sementara itu, Prolegnas sering digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja legislasi DPR. Namun, kinerja fungsi legislasi tidak hanya diukur dari jumlah UU yang dihasilkan dan yang terlibat tidak hanya DPR, tapi juga kementerian/lembaga sebagai wakil dari pemerintah. "Fungsi legislasi merupakan suatu rangkaian proses yang panjang, mulai penyusunan RUU, pembahasan RUU bersama dengan presiden/pemrintah, hingga pengambilan keputusan dalam Rapat Paripur-

na DPR guna mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah," jelasnya.

Dengan begitu, lanjut dia, paradigma pengukur kinerja DPR didasarkan pada aspek kuantitatif atau jumlah UU yang dapat diselesaikan perlu diubah. Kemajuan demokrasi tidak bisa hanya diukur dari sebatas produktivitas DPR sebagai penghasil UU. Pendekatan proses dan *outcome* layak untuk lebih dikedepankan dibanding jumlah semata. Pendekatan proses dapat dilihat dari bagaimana kebebasan mengemukakan pendapat, proses penyerapan aspirasi, tingkat partisipasi publik, dan dinamika dalam setiap pembahasan RUU. "Stigma DPR sebagai *rubber stamp* sudah lama di-

tinggalkan. Pembahasan RUU dilakukan cukup alot dan dinamis sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Bahkan, tidak jarang beberapa fraksi secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya atau menerima dengan catatan kritis," tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa inisiatif *open parliament* atau DPR yang terbuka guna melengkapi dan memperkuat parlemen modern yang telah lama digagas DPR. *Open parliament* ini merupakan inisiatif kolaborasi dan partisipasi masyarakat di DPR semakin terbuka yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan representasi masyarakat.

"Ke depan harus terbuka

(rapat-rapat di DPR), ke depan tidak boleh lagi ada yang tertutup," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjabat sebagai ketua komisi hukum dan HAM, menjadi prinsip dasar hukum pasti mengerti. Karenaitu, dia berharap tidak ada lagi anggota DPR yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mudah-mudahan tidak ada lagi yang *ketangkap* KPK," kata OSO di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Kemudian dengan kinerja DPR yang besar, lanjut OSO, tentu potensi untuk mewujudkan harapan masyarakat terlalu besar sehingga akan lebih bijak jika beban besar DPR itu bisa dibagi dengan DPD agar bebannya menjadi lebih ringan agar tujuan itu bisa tercapai. "Nah, terlalu besar ini bebannya akan berat sekali. Itu sebabnya saya katakan bagi polisi itu dengan DPD supaya apa? supaya bebannya ringan tujuannya tercapai begitu," ujarnya.

Namun, OSO juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPR agar hasil survei Charta Politika, bahwa kepercayaan masyarakat meningkat kepada DPR bukan sebuah rekayasa. Dan, DPR bisa konsisten dalam menjalankan fungsi dan mengawal tujuannya. "Kita tentunya berdoa agar DPR melakukan eksistensinya betul-betul konsisten terhadap tujuan-tujuan pokok pada perintah undang-undang itu sendiri," pungkasnya.

● kiswondari